

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA



EDISI
DESEMBER
2019

©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI DESEMBER 2019

ISSN : 2477-4472
Katalog BPS : 1103009.94
No. Publikasi : 94550.1926

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Tata Letak Statistik : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Kover Statistik : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2019
viii + 54 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

HEADLINE

INFLASI

November 2019



Kota Jayapura
0,85 %
IHK 140,49

Merauke
1,21 %
IHK 138,91

01



NILAI TUKAR PETANI

November 2019

NTP 93,13
Inflasi Pedesaan 0,62 %

02



EKSPOR IMPOR (Juta US\$)

November 2019

Ekspor 60,37
Impor 34,32
Neraca Perdagangan 26,06

03

ANGKUTAN LAUT

Oktober 2019



Penumpang(org)	Barang(ton)
Berangkat 15.773	Muat 17.043
Datang 9.739	Bongkar 117.906

04

PRAKATA

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Import, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan. Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, Desember 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,

Drs. SIMON SAPARY, M.Sc

DAFTAR ISI

- iv _____ *Headline*
- vi _____ *Prakata*
- viii _____ *Daftar Isi*

Sosial dan Kependudukan

- 3 _____ *Penduduk*
- 6 _____ *Kemiskinan*
- 9 _____ *Ketenagakerjaan*
- 11 _____ *Indeks Pembangunan Manusia*
- 14 _____ *Indeks Kebahagiaan*
- 16 _____ *Potensi Desa (PODES)*

Ekonomi dan Perdagangan

- 20 _____ *Inflasi (update)*
- 22 _____ *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*
- 25 _____ *Ekspor (update)*
- 27 _____ *Impor (update)*
- 29 _____ *Nilai Tukar Petani (NTP) (update)*
- 31 _____ *Angkutan Laut (update)*
- 33 _____ *Industri Manufaktur*
- 35 _____ *Indeks Tendeksi Konsumen (ITK)*

Pertanian

- 39 _____ *Pertanian*

Indikator Lainnya

- 41 _____ *Informasi Lainnya*



**SOSIAL
DAN
KEPENDUDUKAN**

<https://papua.bps.go.id>

PENDUDUK



Tahukah anda??

“Jumlah penduduk Papua tahun 209 mencapai 3.379.302 jiwa”

Awalnya, penduduk dipandang hanya sebagai input atau alat dalam pembangunan, bukan sebagai sasaran pembangunan. Saat itu fokus pembangunan antara lain hanya pada modal, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

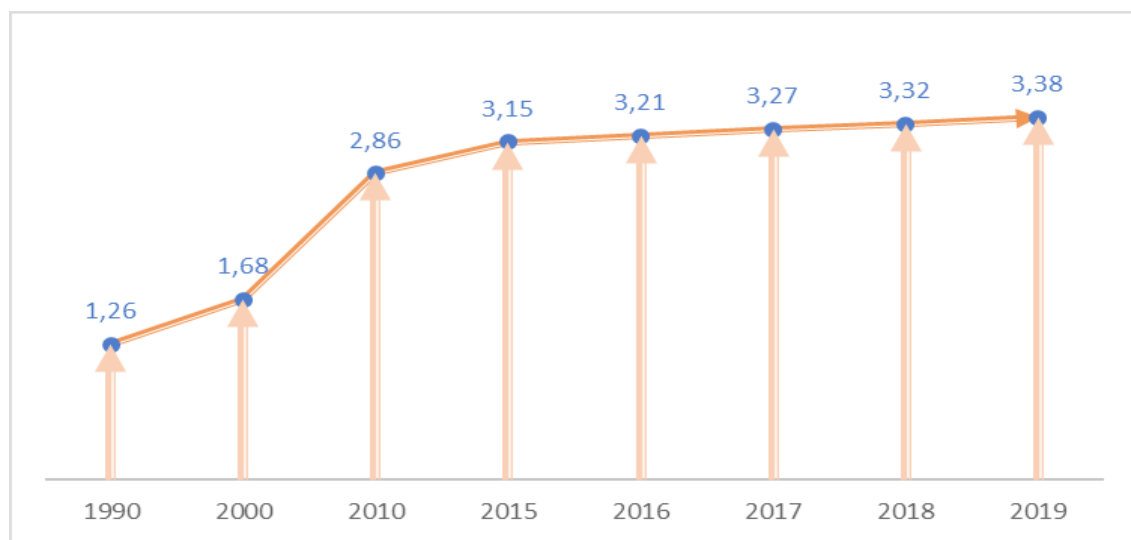
Di tahun 1990, setelah beberapa dekade pembangunan berlalu, ditemukan fakta bahwa kenaikan pendapatan nasional belum tentu dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup penduduknya. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa selain sebagai alat pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran pembangunan.

Oleh karena itulah fokus pembangunan berpindah dari kebijakan yang terfokus pada pendapatan nasional menjadi kebijakan yang terpusat pada pembangunan manusia (Harry Seldadyo, UNDP).

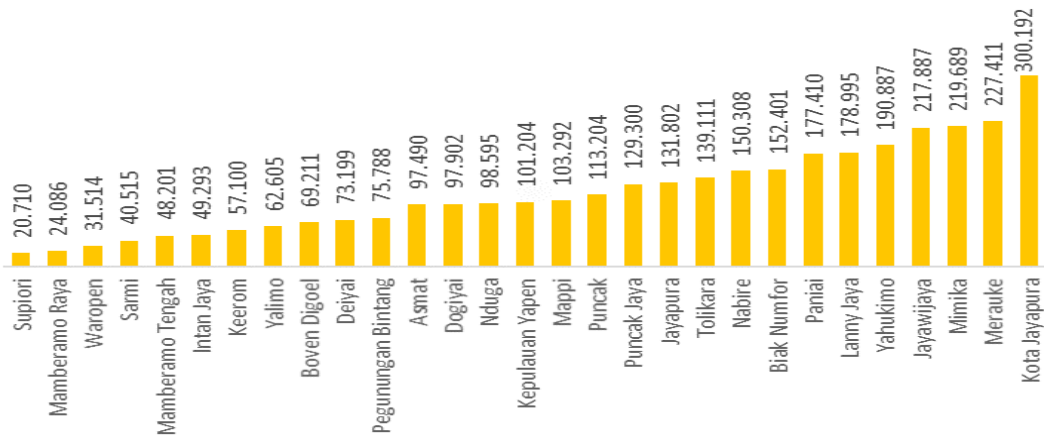
Hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan bahwa di tahun 2019, jumlah penduduk Papua mencapai 3.379.302 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,76 persen dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2018.

Menurut penyebarannya, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Jayapura yang mencapai 300.192 jiwa, sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk 20.710 jiwa.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1990, 2000, 2010, 2015–2019 (juta orang)



Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2019 (orang)



Dengan luas wilayah mencapai 316.553,07 km², kepadatan penduduk di Provinsi Papua hanya 10 jiwa/km². Disparitas kepadatan penduduk antar kabupaten/kota sangat tinggi. Kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua yang mencapai 303-304 jiwa/km²; sedangkan yang terendah adalah di Mamberamo Raya yang hanya sekitar 8 jiwa per km².

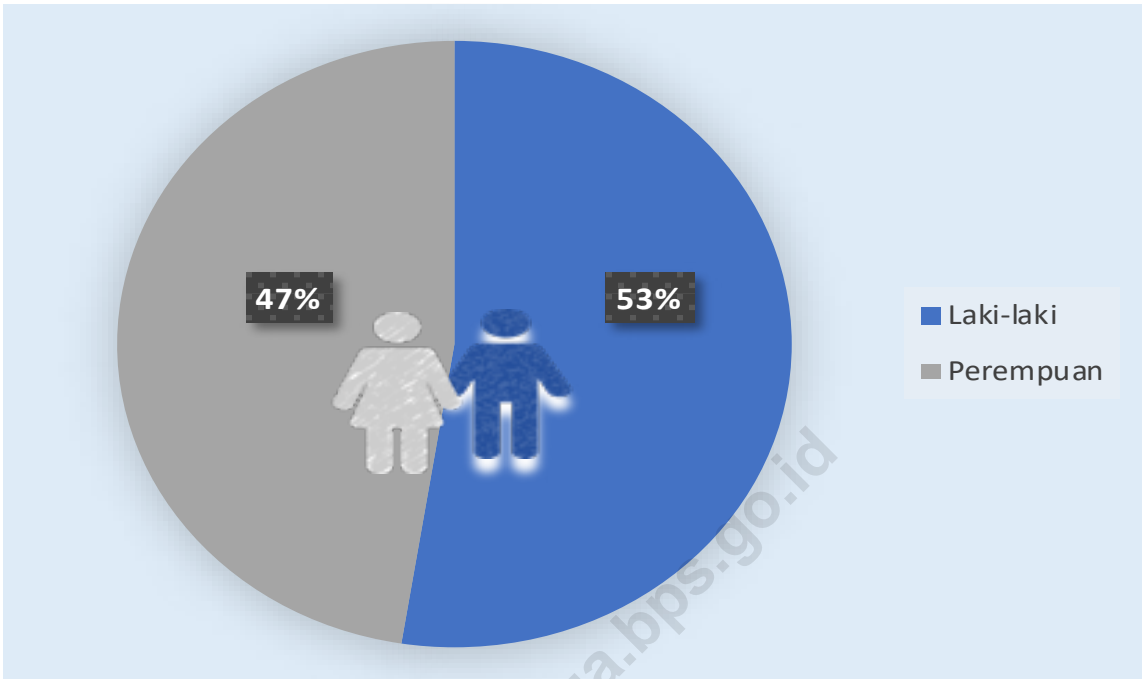
Untuk melihat perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah dapat digunakan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 110,60. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 110 hingga 111 penduduk laki-laki.

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk Papua berada dalam kelompok umur muda. Hal ini ditunjukkan dari bentuk piramida penduduk Papua yang termasuk dalam kategori ekspansif (piramida penduduk muda) yang mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Papua.

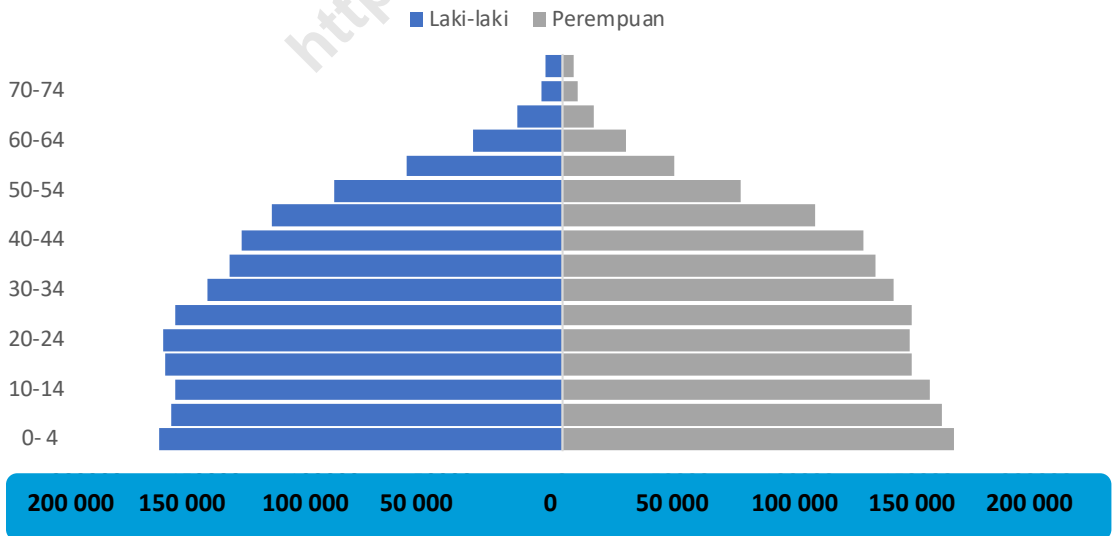
Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan menunjukkan beban atau banyaknya penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Secara umum, rasio ketergantungan di Papua tahun 2019 sebesar 44,32 yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2019 (orang)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua, 2019 (orang)



KEMISKINAN



Tahukah anda??

“Persentase penduduk miskin Provinsi pada September 2018 turun menjadi 27,43 persen, terendah dalam kurun waktu dua dekade terakhir”

Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

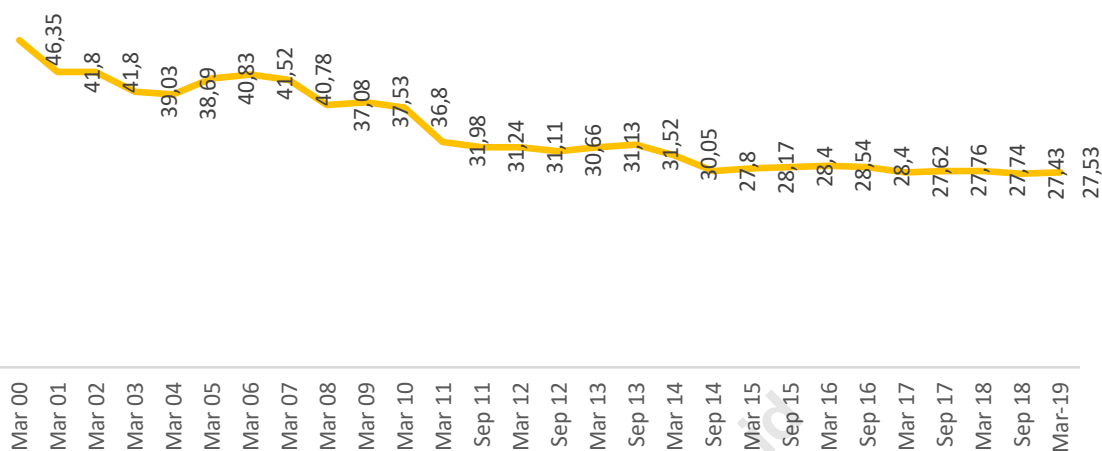
Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) menurun 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin.

Selama enam bulan terakhir persentase penduduk miskin Papua mengalami peningkatan sebesar 0,10 persen poin yaitu dari 27,43 persen pada September 2018 menjadi 27,53 persen pada Maret 2019. BerbedalagijikadibandingkanMaret 2018, terjadi penurunan 0,21 poin persen.

Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2019 terdapat 885,35 ribu jiwa atau 36,84 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 41,01 ribu jiwa atau 4,26 persen.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2018), terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,25 persen. Untuk daerah perdesaan persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen.

Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, Maret 1999 – Maret 2019 (persen)



Data Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di 3 (tiga) provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu secara berurutan 27,53 persen, 22,17 persen dan 21,09 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,47 persen, diikuti oleh Provinsi Bali 3,79 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,55 persen.

Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2019 adalah Rp.540.099,-. Selama September 2018-Maret 2019 terjadi kenaikan GK, yaitu mencapai Rp 21.288,- atau sebesar 4,10 persen.

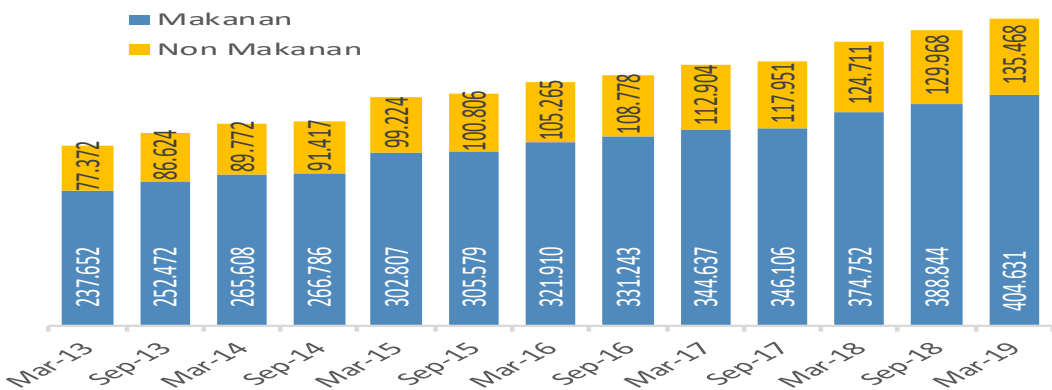
Menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada Maret 2019 adalah sebesar Rp.588.744,-. Nilai ini lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang mencapai Rp 520.117,-. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Jika dilihat pada periode Maret 2018-September 2018, indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 5,91 pada September 2018 menjadi 7,17 pada Maret 2019. Demikian pula dengan Indeks Keparahakan Kemiskinan naik dari 1,82 menjadi 2,60 pada periode yang sama. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua, 2012-September 2018 (rupiah)

Tahun	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Sep-12	344 415	281 022	297 502
Mar-13	362 401	298 395	315 025
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385
Mar-16	466 985	412 991	427 176
Sep-16	479 294	425 264	440 021
Mar-17	498 368	441 287	457 541
Sep-17	508 403	446 994	464 056
Mar-18	542 542	482 000	499 643
Sep-18	566 903	499 615	518 811

Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua, Maret 2013-Maret 2019 (rupiah)



KETENAGAKERJAAN



Tahukah anda??

“Nilai TPAK dan TPT Papua pada Agustus 2019 masing-masing sebesar 79,92 persen dan 3,65 persen”

Pada Agustus 2019, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Februari 2019. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,84 juta orang atau bertambah 6.240 ribu orang dibandingkan Agustus 2018.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 berkurang dibandingkan Agustus 2018. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua pada Februari 2019 mengalami penurunan sekitar 2,19 persen dibanding Agustus 2018.

Jumlah pengangguran di Papua pada Agustus 2019 sebanyak 67.173 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak Februari 2019. Jumlah pengangguran bertambah 8.417 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 3,20 persen pada Agustus 2018 menjadi 3,65 persen pada Agustus 2019.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Februari 2017 –Agustus 2019

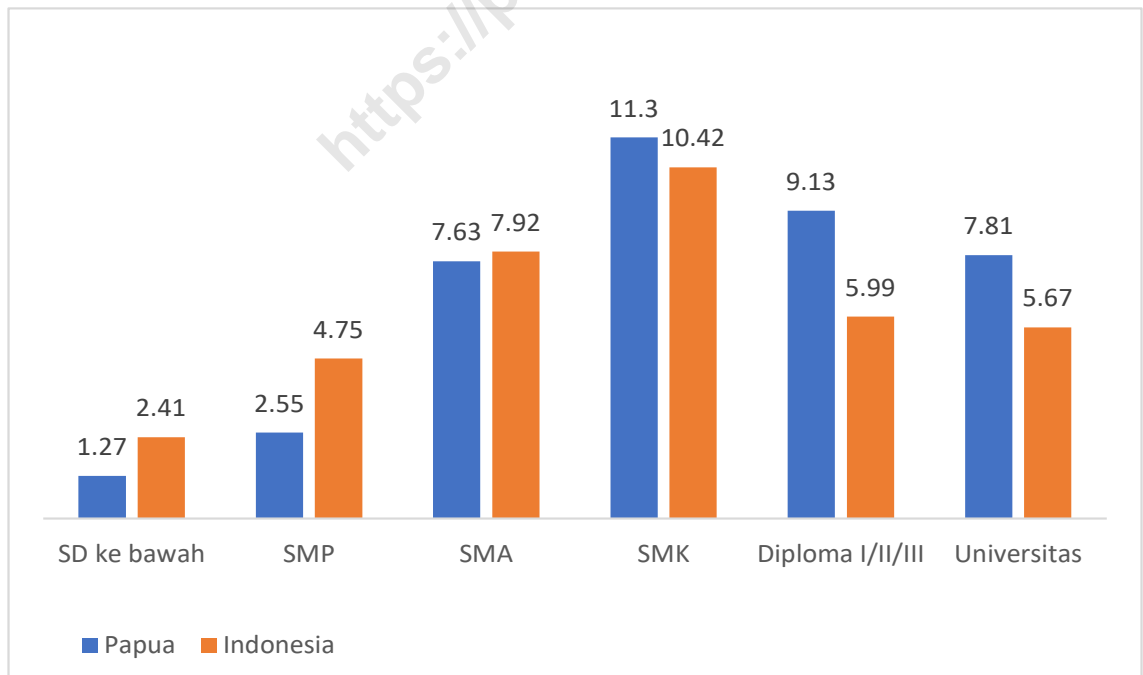
Jenis Kegiatan Usaha	2017		2018		2019	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk 15+	2 268 851	2 291 111	2.332.383	2.320.862	2.378.923	2,394,887
Angkatan Kerja	1 753 858	1 762 841	1.851.486	1.835.963	1.808.848	1,842,203
Bekerja	1 684 389	1 699 071	1.797.668	1.777.207	1.746.963	1,775,030
Penganggur	69 469	63 770	53.818	58.756	61.885	67,173
Bukan Angkatan Kerja	514 993	528 270	480.897	498.899	570.075	552,684
Sekolah	188 297	181 879	193.332	176.043	220.158	188,438
Mengurus RT	274 816	278 056	243.493	256.249	277.906	293,959
Lainnya	51 880	68 335	44.072	52.607	72.011	70,287
TPAK (%)	77,30	76,94	79,38	79,11	76,04	76,92
TPT (%)	3,96	3,62	2,91	3,20	3,42	3,65

Angka pengangguran di Papua masih berada jauh dibawah angka pengangguran nasional sebesar 5,28 persen. TPT tertinggi di Papua berada pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan yang mencapai 11,30 persen. Penganggur dengan tingkat Pendidikan sekolah lainnya yang memiliki TPT diatas lima persen yakni penganggur dengan tingkat Pendidikan Diploma I/II/III (9,13 persen), Universitas (7,81 persen) dan Sekolah Menengah Atas (7,63 persen).

Pada Agustus 2019, TPT terkecil berada pada penganggur dengan tingkat pendidikan SD Ke bawah yaitu 1,27 persen.

Dari total penduduk yang bekerja 1.775.030 orang pada Agustus 2019 di Papua, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (30,27 persen) kemudian diikuti oleh status berusaha dibantu butuh tidak tetap/tidak dibayar (29,87 persen). Adapun status pekerjaan dalam utama lainnya diatas 10 persen yakni berusaha sendiri (17,35 persen), dan buruh/karyawan (20,61 persen). Status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian memiliki persentase kurang dari satu persen.

Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Papua, Agustus 2019



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Tahukah anda??

“IPM Provinsi Papua tahun 2018 sebesar 60,06 dan status pembangunan berubah dari kategori rendah menjadi sedang”



Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

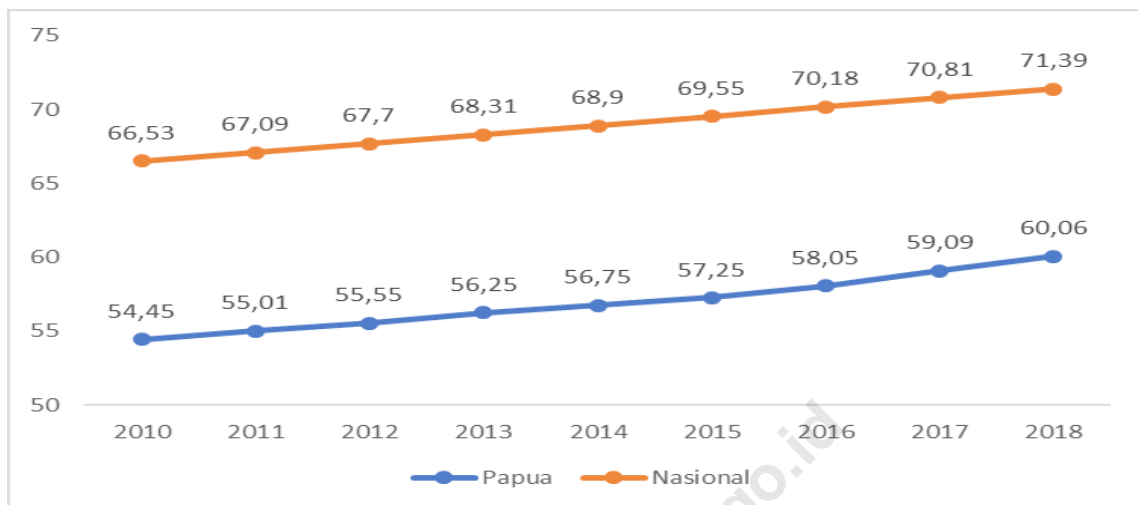
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup

dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi sebesar 60,06 di tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM di provinsi paling timur Indonesia ini rata-rata tumbuh sebesar 1,64 persen.

Gambar 8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2018



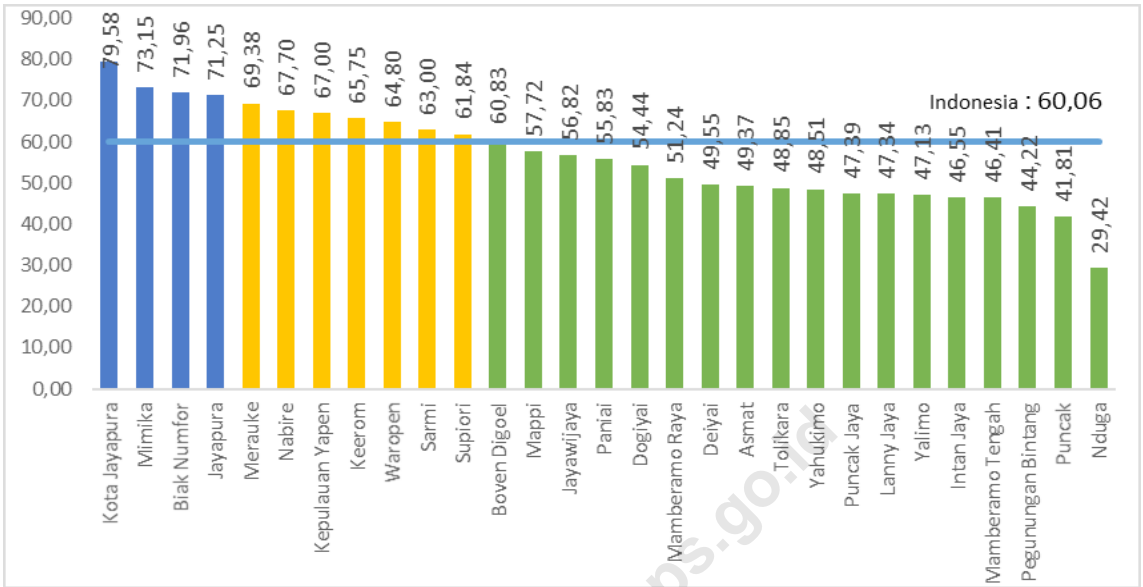
Dan selama tahun 2017-2018, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus “rendah” menjadi berstatus “sedang”.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2018 cukup bervariasi. Mayoritas kabupaten di Papua masih memiliki status “rendah”. Kabupaten dengan IPM berstatus “sedang” adalah Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, dan Supiori. Adapun kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” adalah Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua yaitu sebesar 29,42. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2018, IPM Kota Jayapura ini mencapai 79,61.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami kenaikan IPM. Top movers IPM di Papua (kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat), yaitu: Kabupaten Nduga (5,56 persen), Pegunungan Bintang (2,27 persen), dan Yalimo (2,04 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan.

Gambar 9. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2018



INDEKS KEBAHAGIAAN



Tahukah anda??

“Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52.”

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2014 karena adanya penambahan cakupan indeks. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, dalam indeks kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya yaitu pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 67,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 60,97.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,42, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 63,04 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 73,80; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,42; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 69,98. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan indikator penyusunnya, indeks indikator tertinggi adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan yaitu sebesar 75,79 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 53,54 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2017

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
		Personal	Sosial			
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	73,51	71,86	78,09	74,97	68,03	77,02
Perdesaan	65,29	59,77	72,21	65,99	62,25	67,37
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	66,67	61,86	73,17	67,51	63,13	69,06
Perempuan	70,36	67,04	75,92	71,48	66,13	73,10
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,04	65,68	73,39	69,54	65,26	72,00
Menikah	67,51	63,15	73,87	68,51	63,77	69,93
Cerai Hidup	66,22	62,65	75,25	68,95	57,60	71,33
Cerai Mati	67,37	61,08	72,86	66,97	65,15	69,82
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	67,22	62,63	74,02	68,32	61,41	71,41
25-40 Tahun	67,06	62,60	73,03	67,82	63,49	69,55
41-64 Tahun	68,03	63,54	74,66	69,10	64,37	70,29
≥ 65 Tahun	67,61	63,13	72,82	67,97	62,86	71,58
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	66,77	61,84	73,23	67,53	63,23	69,24
Pasangan KRT	71,86	70,06	77,14	73,60	67,23	74,31
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,42	63,14	70,61	66,88	66,01	69,27
2 Orang	66,99	62,11	72,03	67,07	64,87	68,86
3 Orang	66,13	62,76	72,95	67,85	61,46	68,65
4 Orang	67,40	63,11	73,95	68,53	63,32	69,97
5 Orang atau Lebih	68,83	63,56	75,43	69,49	65,16	71,50
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	63,49	56,63	70,98	63,80	61,68	64,83
Tidak tamat SD/ sederajat	65,95	62,55	73,93	68,24	60,15	68,93
SD sederajat	65,54	60,08	73,97	67,03	60,99	68,19
SMP sederajat	69,72	65,12	74,03	69,57	67,18	72,20
SMA sederajat	71,03	69,29	76,20	72,75	65,49	74,36
Diploma I, II, III	73,48	73,83	76,22	75,02	68,37	76,59
Diploma IV/S1	75,16	73,86	77,50	75,68	70,55	78,84
S2, S3	76,48	76,94	73,83	75,38	73,11	80,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	62,39	56,29	70,23	63,26	58,03	65,50
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	67,41	61,62	73,63	67,63	65,02	69,37
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,56	68,19	77,31	72,75	65,30	73,13
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,78	74,60	78,29	76,44	70,37	77,12
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,25	75,54	77,34	76,44	71,32	77,62
Papua	67,52	63,04	73,80	73,80	68,42	69,98

POTENSI DESA (PODES)



Tahukah anda??

“Data PODES 2018 mencatat, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota”

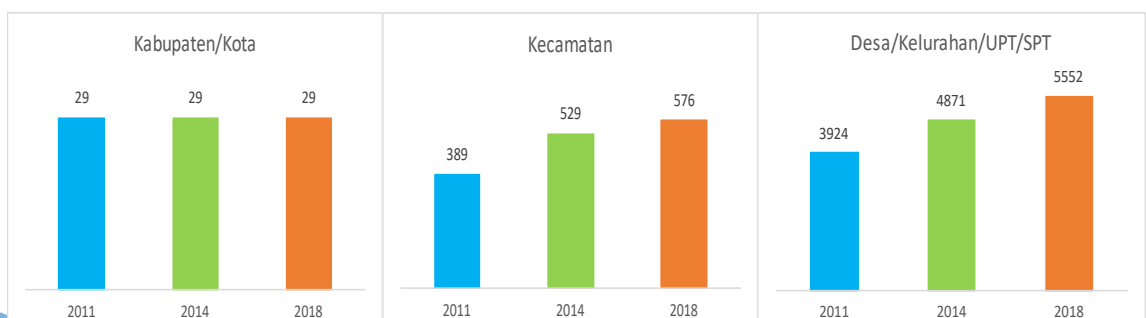
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri

darilima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Gambar 10. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018



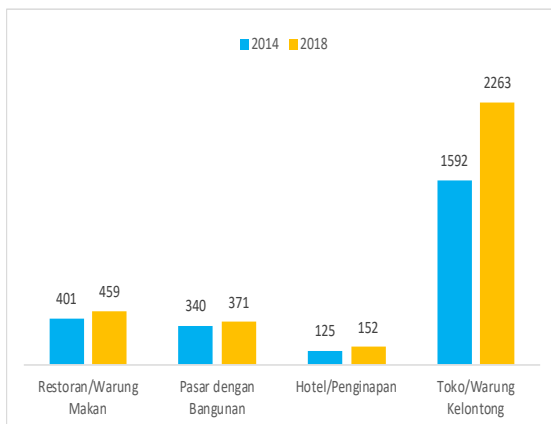
Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas

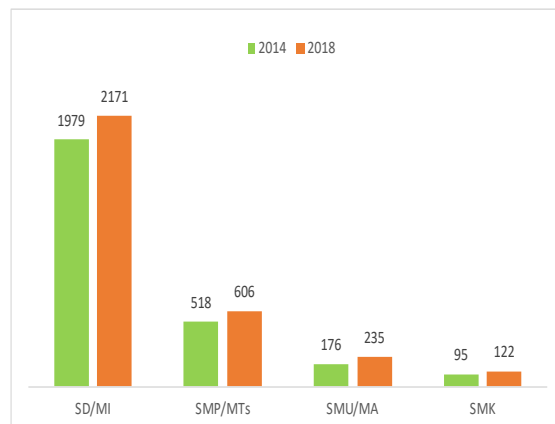
pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 11. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018





**EKONOMI
DAN
PERDAGANGAN**

<https://papualps.go.id>

INFLASI

Tahukah anda??

“Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,85 persen dan Merauke mengalami inflasi sebesar 1,21 persen pada November 2019.”



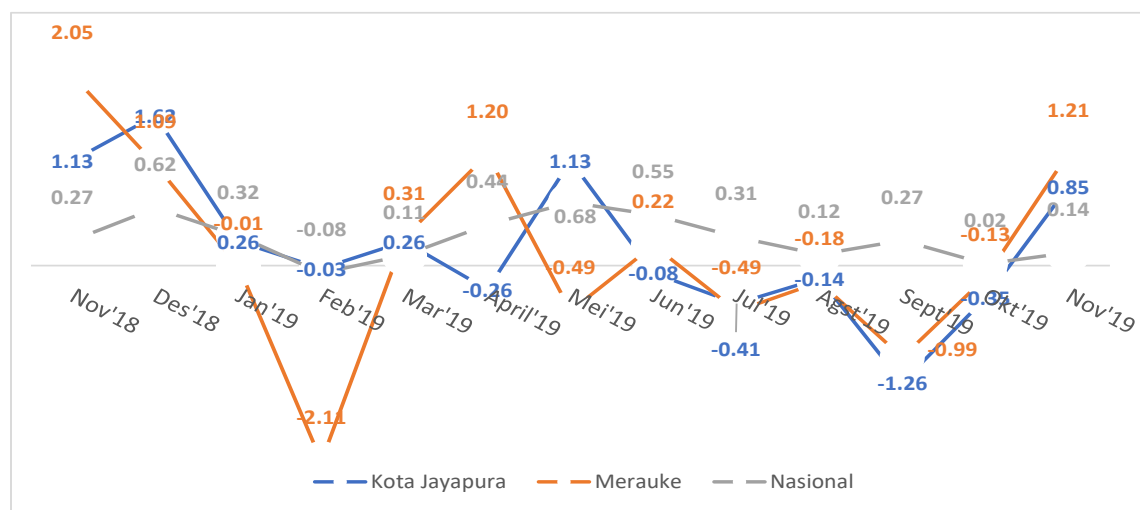
Pada Bulan November 2019 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan angka indeks yang searah, dimana Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,85 persen dan Merauke mengalami inflasi 1,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) masing-masing sebesar 140,49 dan 138,91.

Deflasi di Kota Jayapura terjadi akibat penurunan harga barang dan jasa pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,01 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,26 persen. Adapun kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok bahan makanan sebesar 3,41 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar

0,26 persen; kelompok sandang sebesar 0,16 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01 persen.

Faktor pendorong terjadinya inflasi di Kota Jayapura bulan November 2019 adalah kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: ikan ekor kuning, ikan cakalang, cabai rawit, cuci kendaraan, ikan deho, cabai merah, ikan kawalina, daging sapi, ikan bakar, jeruk nipis, dan lain-lain. Adapun komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain: tarif angkutan udara, kangkung, bawang putih, ikan salam, sawi hijau, wortel, telur ayam ras, bayam, ikan kembung, kubis, dan lain-lain.

Gambar 13. Perkembangan Inflasi Kota Jayapura, Merauke dan Nasional Nov 2018-Nov 2019



Sedangkan di Merauke kenaikan harga barang dan jasa disebabkan oleh kenaikan angka indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,37 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,84 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,10 persen; kelompok sandang sebesar 0,11 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 0,52 persen. Adapun kelompok yang menahan inflasi yaitu pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,02 persen serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,26 persen.

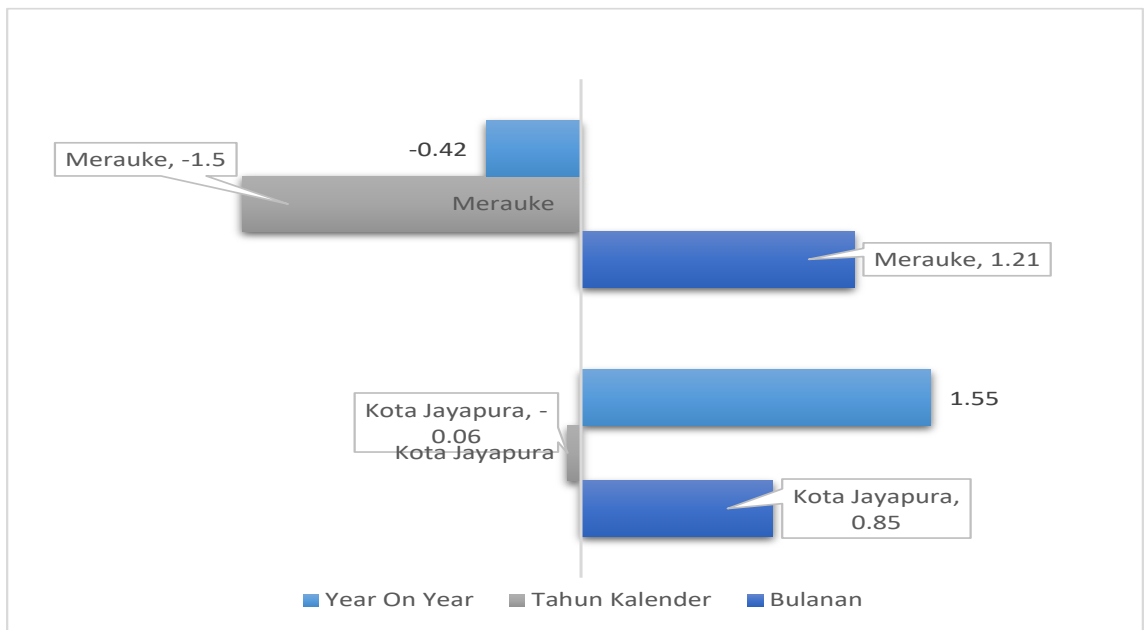
Sementara itu faktor pendorong terjadinya inflasi di Merauke bulan November 2019 adalah kenaikan harga pada beberapa komoditas antara lain: ikan mujair, kacang panjang, air kemasan, bayam, udang basah, kubis, perbaikan ringan kendaraan, buncis, semangka, cat tembok, dan lain-lain. Adapun komoditas yang mengalami penurunan harga cukup signifikan yaitu pada komoditi:

tarif angkutan udara, cabai merah, daging ayam ras, beras, minyak goreng, daging ayam kampung, ikan paha, kangkung, keladi, cat kayu/cat besi, dan lain-lain.

Dari 82 kota IHK tercatat 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota lainnya mengalami deflasi. Kota Jayapura menempati urutan ke-5 di tingkat nasional dan ke-4 di tingkat Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua), sedangkan Merauke menempati urutan ke-2 di tingkat nasional dan ke-2 di tingkat Sulampua.

Inflasi tahun kalender di Kota Jayapura pada bulan November 2019 sebesar -0,06 persen, dan laju inflasi year on year (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 1,55 persen. Inflasi tahun kalender Merauke di bulan November 2019 sebesar -1,50 persen, dan laju inflasi year on year (November 2019 terhadap November 2018) sebesar -0,42 persen.

Gambar 14. Laju Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year On Year di Kota Jayapura dan Merauke, November 2019 (%)



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)



Tahukah anda??

“Ekonomi Papua triwulan III-2019 mengalami kontraksi -15,11 persen.”

Perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp 50,35 triliun.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

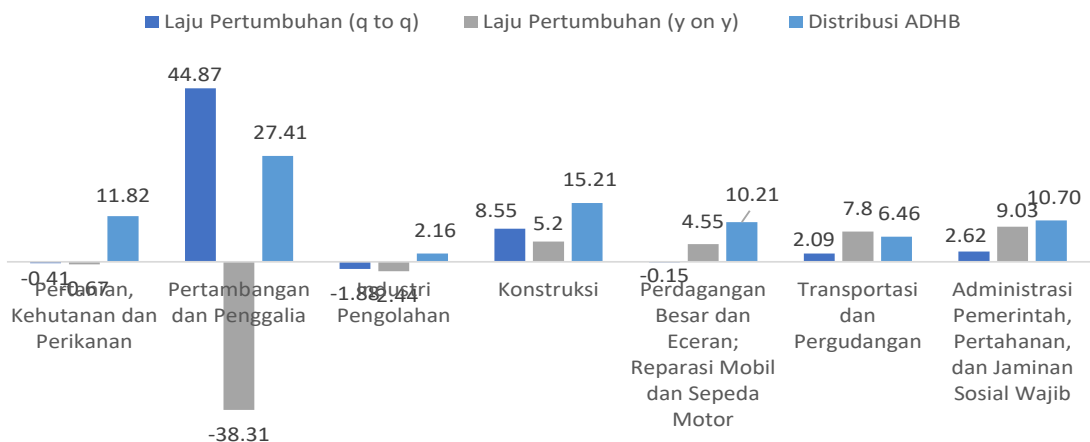
Ekonomi Papua triwulan III-2019 mengalami kontraksi -15,11 persen (y on y). Kontraksi pertumbuhan ini disebabkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar -38,31 persen akibat turunnya bijih logam PT. Freeport di Papua.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (q to q) mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 3,90 persen. Adanya beberapa event festival budaya daerah dan tahun ajaran baru pada triwulan III ini menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha

mengalami pertumbuhan positif.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama triwulan III-2019 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -0,05 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,02 persen.

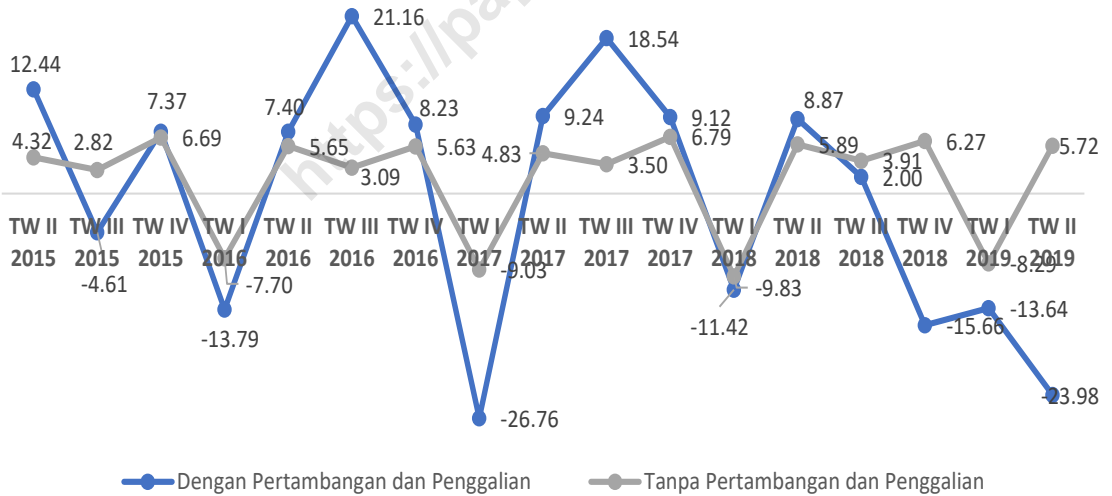
Gambar 15. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2019



Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan III-2019 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi jauh di atas lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,70 persen; Konstruksi sebesar 0,54 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,34 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,31 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,19 persen.

Nilai PDRB per kapita Papua pada triwulan III-2019 sebesar Rp 14,84 juta, naik dibandingkan triwulan lalu yang sebesar Rp 13,40 juta atau naik sebesar 10,72 persen. Jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita triwulan III-2019 sebesar Rp 10,77 juta, juga menunjukkan peningkatan dari triwulan II-2019 yang senilai Rp 10,54 juta atau meningkat sebesar 2,24 persen.

Gambar 16. Pertumbuhan Ekonomi q-to-q Provinsi Papua, Triwulan III-2015 – Triwulan III-2019





Tahukah anda??

“Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi terdalam pada triwulan III-2019”

B. PDRB Menurut Pengeluaran

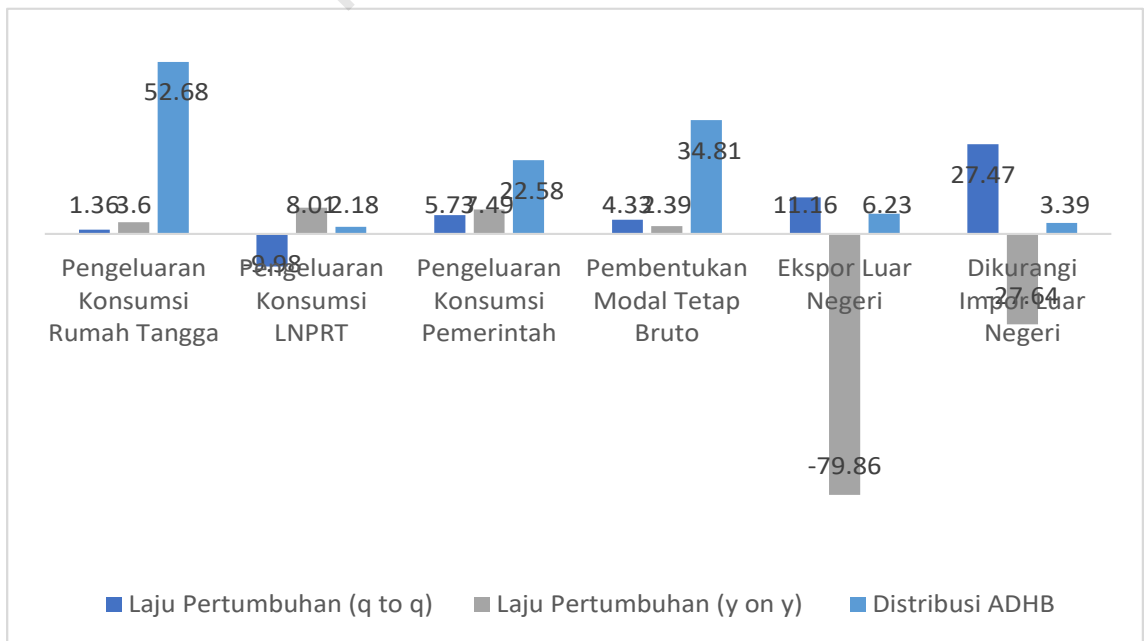
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar -15,11 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar -79,86 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (y-on-y), Komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,34 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 1,15 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap

Brutosebesar0,61persen.Sementarasumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya berada dibawah 0,50 persen.

Ekonomi Papua Triwulan III-2019 jika dibandingkan Triwulan II-2019 (q to q) tumbuh sebesar 13,90 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi pada komponen Impor Luar Negeri sebesar 27,47 persen, kemudian Ekspor Luar Negeri sebesar 11,16 persen, PK-P sebesar 5,73 persen, komponen PMTB sebesar 4,33 persen dan Komponen PK-RT sebesar 1,36 persen.

Gambar 17. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan III-2019 Provinsi Papua



EKSPOR



Tahukah anda??

“Pada November 2019, total ekspor Papua mencapai US\$60,37 juta”

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada November 2019 tercatat senilai US\$60,37 juta atau menurun sebesar 73,07 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$224,15 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua bulan ini terdiri dari ekspor migas US\$250 dan ekspor nonmigas US\$60,37 juta. Ekspor terbesar berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$48,52 juta atau 80,37 persen dari total ekspor Papua.

Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-November 2019 adalah senilai US\$1.048,76 juta atau menurun sebesar 72,16 persen dibandingkan total ekspor Januari-November 2018 yang senilai US\$3.767,5 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) tercatat senilai US\$48,48 juta atau menurun 77,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) memiliki nilai sebesar US\$ 0,01 juta atau menurun 59,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor Kayu & Barang dari Kayu (HS44) yang senilai US\$8,07 juta atau meningkat sebesar 30,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan ekspor golongan Non Migas Lainnya yang senilai US\$3,82 juta mengalami peningkatan 2.226,53 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor golongan Non Migas Lainnya terbesar dari kelompok Industri Minyak Nabati/Hewani (HS15), dimana nilai ekspor sebesar

Tabel 4. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua, Januari-November 2019

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Nov 2019* thdp Okt 2019	% Perubahan Jan-Nov'19 thd Jan-Nov'18	% Peran thd Total Ekspor Jan-Nov' 19*
	Okt' 2019	Nov'19*	Jan-Nov 2018	Jan-Nov 2019*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Total Ekspor	224,15	60,37	3.767,50	1.048,76	-73,07	-72,16	100,00
Migas	0,00	0,00	0,06	0,02	-74,28	-55,64	0,00
Non Migas	224,15	60,37	3.767,44	1.048,73	-73,07	-72,16	100,00

Ket:

Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

26

Indikator Penting Provinsi Papua
Edisi Desember 2019

US\$2,51 juta atau berkontribusi sebesar 4,15 persen dari nilai total ekspor.

Nilai kumulatif ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) pada periode Januari-November 2019 sebesar US\$932,22 juta. Nilai ini menurun apabila dibandingkan dengan periode Januari-November 2018 yang sebesar US\$3.675,59 juta. Golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) memiliki nilai kumulatif sebesar US\$85,12 juta. Sementara itu Golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) memiliki nilai kumulatif sebesar US\$0,19 juta dan golongan Non Migas Lainnya mengalami peningkatan menjadi US\$31,2 juta.

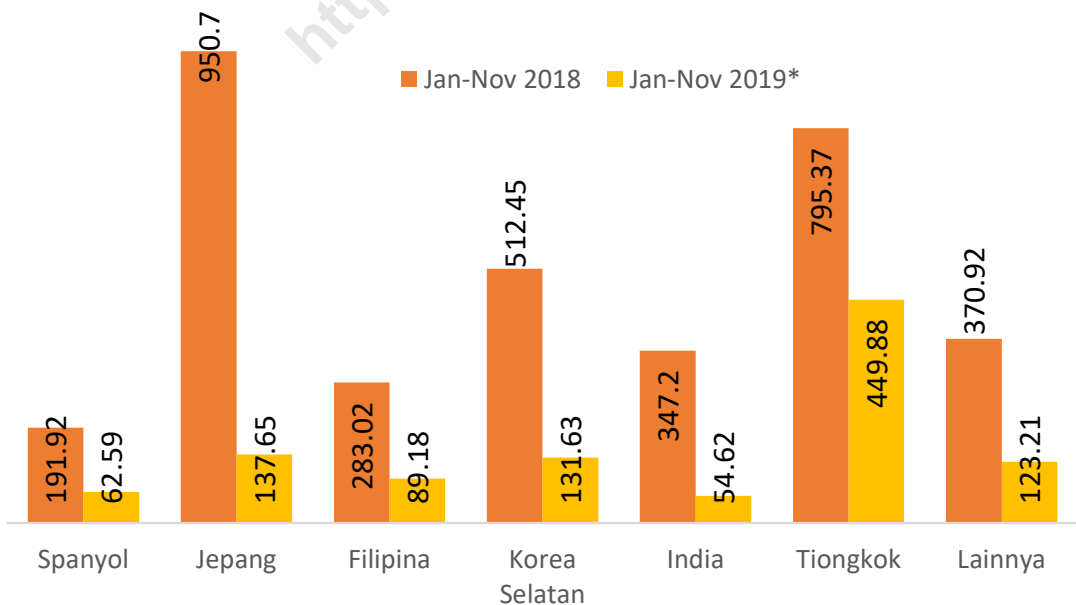
C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor ke enam negara utama pada November 2019 tercatat senilai US\$50,98 juta atau menurun 72,08 persen dibanding

nilai pada Oktober 2019 yang sebesar US\$182,57 juta. Ekspor ke negara lainnya pada November 2019 yang senilai US\$9,4 juta mengalami penurunan 77,4 persen dibanding Oktober 2019 yang sebesar US\$41,58 juta. Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor US\$4,57 juta, dimana komoditi yang diekspor berupa industri kayu lapis.

Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama dan negara lainnya pada periode Januari-November 2019 menurun masing-masing sebesar 69,96 persen dan 66,78 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 88,25 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-November 2019.

Gambar 18. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari -November 2019 (Juta US\$)



IMPOR



Tahukah anda??

“Pada November 2019, total impor Papua mencapai US\$34,32 juta”

A. Impor Migas dan NonMigas

Impor Papua pada November 2019 tercatat senilai US\$34,32 juta yang terdiri dari impor migas senilai US\$19,31 juta dan impor nonmigas senilai US\$15,01 juta. Dibandingkan Oktober 2019, nilai impor Papua mengalami peningkatan sebesar 10,63 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan impor migas sebesar 108,3 persen (naik US\$10,04 juta) dan penurunan impor non-migas sebesar 30,99 persen (turun US\$6,74 juta).

Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (HS84) yang memiliki nilai US\$7,05 juta atau sebesar 46,98 persen dari total nilai impor komoditi nonmigas.

Tabel 5. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua, Januari-November 2019

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Nov 2019* thdp Okt 2019	% Perubahan Jan-Nov'19 thd Jan-Nov'18	% Peran thd Total Impor Jan-Nov'19*
	Okt' 2019	Nov'19*	Jan-Nov 2018	Jan-Nov 2019*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	31,02	34,32	490,53	333,53	10,63	-32,01	100,00
Migas	9,27	19,31	171,75	129,37	108,30	-24,68	38,79
Non Migas	21,75	15,01	318,79	204,16	-30,99	-35,96	61,21

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada November 2019 tercatat senilai US\$13,71 juta atau menurun 22,64 persen bila dibandingkan Oktober 2019 yang sebesar US\$17,71 juta.

Golongan barang nonmigas utama yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah golongan Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (HS84) sebesar US\$2,91 juta, Mesin/peralatan listrik (HS85) sebesar US\$1,03 juta, dan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$0,56 juta. Nilai impor golongan nonmigas lainnya mengalami penurunan sebesar 67,71 persen yaitu dari US\$4,03 juta menjadi US\$1,3 juta. Impor nonmigas lainnya yang terbesar berasal dari golongan Daging dan sisa daging yang dapat dimakan (HS02) senilai US\$0,4 juta.

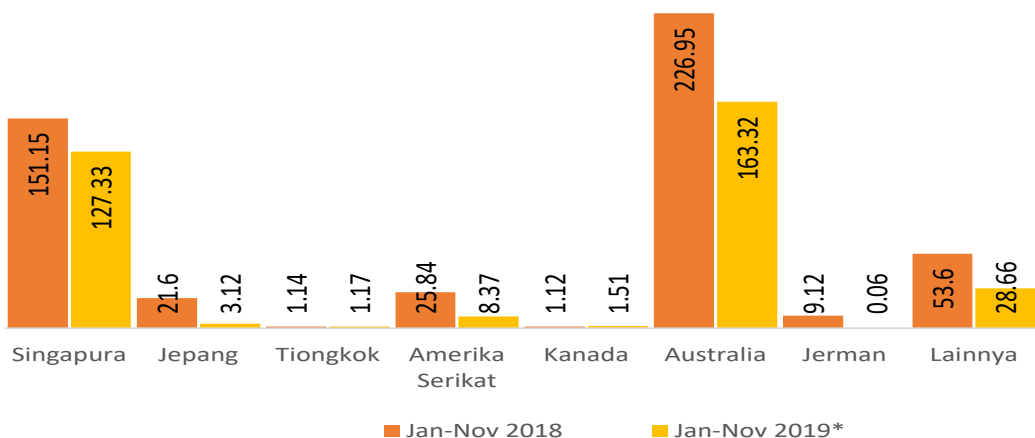
Secara kumulatif, total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-November 2019 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 39,4 persen, yaitu dari US\$249,38 juta menjadi US\$168,99 juta.

Penurunan tersebut didorong oleh turunnya nilai kumulatif impor golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$53,52 juta. Berbanding lurus dengan total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya yang juga turun sebesar 11,91 persen atau lebih rendah US\$4,75 juta. Impor 10 golongan nonmigas utama memberikan andil 50,67 persen terhadap total impor kumulatif Januari-November 2019.

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada November 2019 tercatat sebesar US\$32,29 juta atau meningkat 34,08 persen dibandingkan nilainya pada Oktober 2019 yang sebesar US\$24,08 juta, sedangkan impor dari negara lainnya mengalami penurunan senilai US\$4,91 juta. Tiga negara pemasok barang terbesar ke Papua pada November 2019 adalah Singapura senilai US\$18,45 juta (53,76 persen), Australia dengan impor senilai US\$12,27 juta (35,76 persen), dan Malaysia senilai US\$1,87 juta (5,47 persen).

Gambar 19. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari -November 2019



NILAI TUKAR PETANI (NTP)



Tahukah anda??

“Pada bulan November 2019, NTP Papua sebesar 93,13”

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap harga dibayar petani (Ib) dalam persentase merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

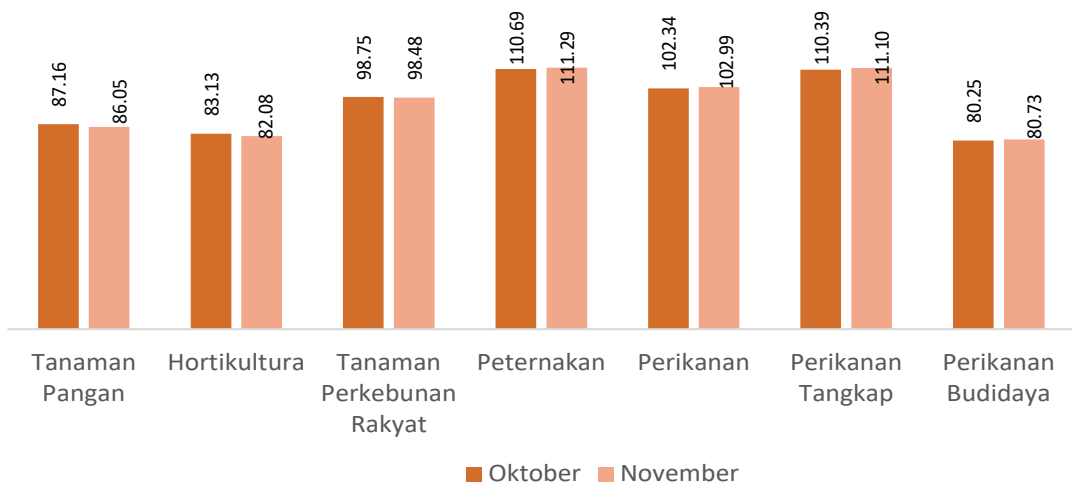
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Papua November 2019 tercatat turun -0,55 persen menjadi 93,13 dibandingkan NTP Oktober 2019.

Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, kenaikan indeks NTP disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,52 persen dan indeks harga diterima petani (It) yang mengalami penurunan angka indeks sebesar -0,03 persen.

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor peternakan naik 0,54 persen dan subsektor perikanan naik 0,63 persen, sedangkan subsektor lainnya mengalami penurunan.

Gambar 20. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Oktober-November 2019 (2012=100)



Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani.

Pada November 2019, It Papua sebesar 125,25 atau turun -0,03 persen dibandingkan It Oktober 2019. Penurunan It terjadi karena It di subsektor Tanaman Pangan turun -0,75 persen, subsektor Hortikultura turun -0,70 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,33 persen, subsektor Peternakan naik 0,94 persen, dan subsektor Perikanan naik 1,23 persen.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani.

Pada November 2019, Ib Papua sebesar 134,49 atau naik 0,52 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 133,79. Perubahan Ib gabungan tersebut didorong oleh Ib subsektor

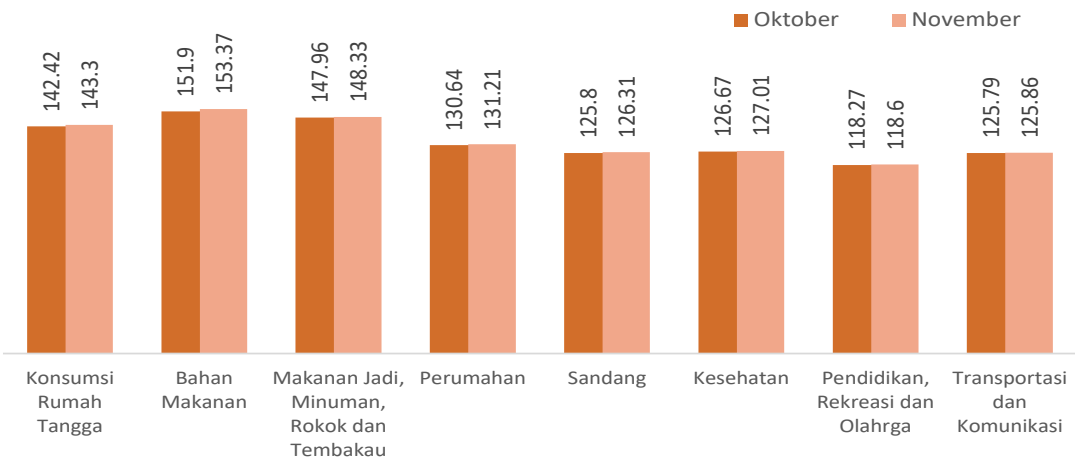
Tanaman Pangan naik 0,53 persen, subsektor Hortikultura naik 0,58 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,61 persen, subsektor Peternakan naik 0,40 persen, dan subsektor Perikanan naik 0,59 persen.

B. Perkembangan Indeks Harga Konsumsi Perdesaan

Pada November 2019, terjadi inflasi 0,62 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh turunnya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar 0,97 persen.

Dari 33 provinsi tercatat 24 provinsi mengalami inflasi perdesaan, 9 provinsi mengalami deflasi perdesaan. Inflasi pedesaan tertinggi terjadi di Sulawesi Utara yaitu sebesar 1,12 persen dan inflasi terendah terjadi di Jawa Barat sebesar 0,04 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Maluku turun -0,48 persen dan deflasi terkecil terjadi di NAD turun sebesar -0,02 persen.

Gambar 21. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Oktober-November 2019 (2012=100)



ANGKUTAN LAUT



Tahukah anda??

"Jumlah penumpang berangkat dan datang dengan angkutan laut pada Oktober 2019 masing-masing sebanyak 15.773 orang dan 9.739 orang."

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Oktober 2019 tercatat sebanyak 15.773 orang atau menurun 16,03 persen dibanding September 2019 yang sebanyak 18.785 orang. Sedangkan jumlah penumpang yang datang pada September 2019 tercatat sebanyak 9.739 orang atau menurun 12,32 persen bila dibandingkan September 2019 yang sebanyak 11.108 orang.

Dilihat menurut pelabuhan, jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Jayapura dan Merauke masing-masing 13.266 orang dan 2.507 orang.

Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui Pelabuhan Jayapura dan Merauke masing-masing sebesar 7.842 orang dan 1.897 orang.

Jumlah embarkasi penumpang angkutan laut pada Januari-Oktober 2019 meningkat 34,53 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang sebanyak 102.617 orang. Sedangkan arus debarkasi penumpang pada periode Januari-Oktober 2019 mengalami peningkatan sebesar 23,54 persen.

Tabel 6. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Oktober 2019

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Sept'19 (Orang)	Okt'19 (Orang)	% Perubahan Okt*thd Sept 19	Sept'19 (Orang)	Okt'19 (Orang)	% Perubahan Okt*thd Sept 19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	15.715	13.266	-15,58	9.207	7.842	-14,83
Merauke	3.070	2.507	-18,34	1.901	1.897	-0,21
Total	18.785	15.773	-16,03	11.108	9.739	-12,32

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Oktober 2019 tercatat sebesar 17.043 ton atau meningkat 30,57 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 13.053 ton.

Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura, tercatat sebesar 11.959 ton atau meningkat 14,88 persen. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang tercatat sebesar 5.084 ton atau meningkat 92,36 persen. Volume barang yang dimuat pada Januari-Oktober 2019 menurun 50,75 persen bila dibandingkan dengan Januari-Oktober 2018 sebesar 231.176 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura sebesar 56,27 persen dan di Pelabuhan Merauke sebesar 15,58 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Oktober 2019 sebesar 117.906 ton atau menurun 2,03 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 120.349 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang pada Oktober 2019 tercatat sebesar 85.217 ton atau turun 7,47 persen dibandingkan September 2019 yang sebesar 92.100 ton. Di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang tercatat sebesar 32.689 ton atau naik 15,72 persen. Volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke pada Januari-Oktober 2019 menurun 1,1 persen bila dibandingkan Januari-Oktober 2018 yang sebesar 1.131.682 ton.

Tabel 7. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Oktober 2019

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Sept'19 (ton)	Okt'19 (ton)	% Perubahan Okt'19 *thd Sept'19	Sept'19 (ton)	Okt'19 (ton)	% Perubahan Okt'19 *thd Sept'19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	92.100	85.217	-7,47	10.410	11.959	14,88
Merauke	28.249	32.689	15,72	2.643	5.084	92,36
Total	120.349	117.906	-2,03	13.053	17.043	30,57

INDUSTRI MANUFAKTUR



Tahukah anda??

“Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan III-2019 tumbuh negatif 4,66 persen”

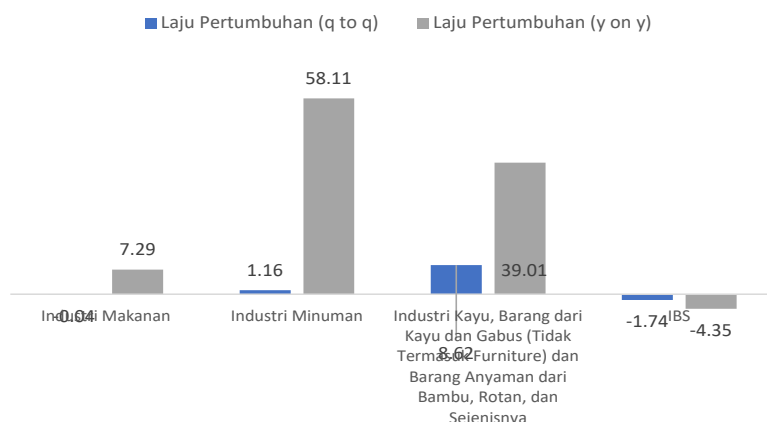
A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan III-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan III-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,66 persen dari Triwulan II-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi dari Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Hal ini dikarenakan perusahaan masih kesulitan memperoleh ijin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusaha Hutan) sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi produksi. Kondisi sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11).

Komoditi ini selama Triwulan III-2019 mengalami pertumbuhan negatif karena adanya penurunan produksi akibat kerusakan yang terjadi di Papua. Kejadian tersebut menyebabkan produksi air minum menurun akibat kerusakan dimana perusahaan tidak dapat beroperasi seperti biasanya.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan III-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan III-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 22,12 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) serta Industri Makanan (KBLI 10) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan III-2019.

Gambar 22. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan III-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan II-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan III-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,03 persen dari Triwulan II-2019 dan berada di bawah pertumbuhan nasional yang tumbuh sebesar 0,29 persen.

Selain adanya kerusuhan, permintaan makanan dan minuman di Papua kembali menurun setelah mengalami kenaikan di Triwulan II-2019 karena adanya bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri.

Secara y-o-y, Provinsi Papua Triwulan III-2019 tumbuh positif, sebesar 15,88 persen diatas pertumbuhan produksi nasional yang tumbuh melambat sebesar 6.19 persen.

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh adanya kerusuhan yang terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya. Produksi makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan *share* cukup besar mengalami pertumbuhan negatif yaitu 2,55 persen dan 10,44 persen dari Triwulan II-2019.

Tabel 8. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan III-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan	
		q to q	y-on-y
10	Industri Makanan	-2,55	9,49
11	Industri Minuman	-10,44	7,96
13	Industri Tekstil	-6,64	28,40
14	Industri Pakaian Jadi	-14,53	8,38
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-3,17	-0,23
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	8,07	-5,57
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-2,52	-12,74
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	38,02	16,44
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-11,35	-6,52
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	-1,03	4,27
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-10,05	5,29
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	97,40	154,45
31	Industri Furnitur	-7,53	7,52
32	Industri Pengolahan Lainnya	-48,83	-12,34
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	61,11	300,35

INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)



Tahukah anda??

“Kondisi ekonomi konsumen di Triwulan III-2019 sebesar 100,08”

A. Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III Tahun 2019

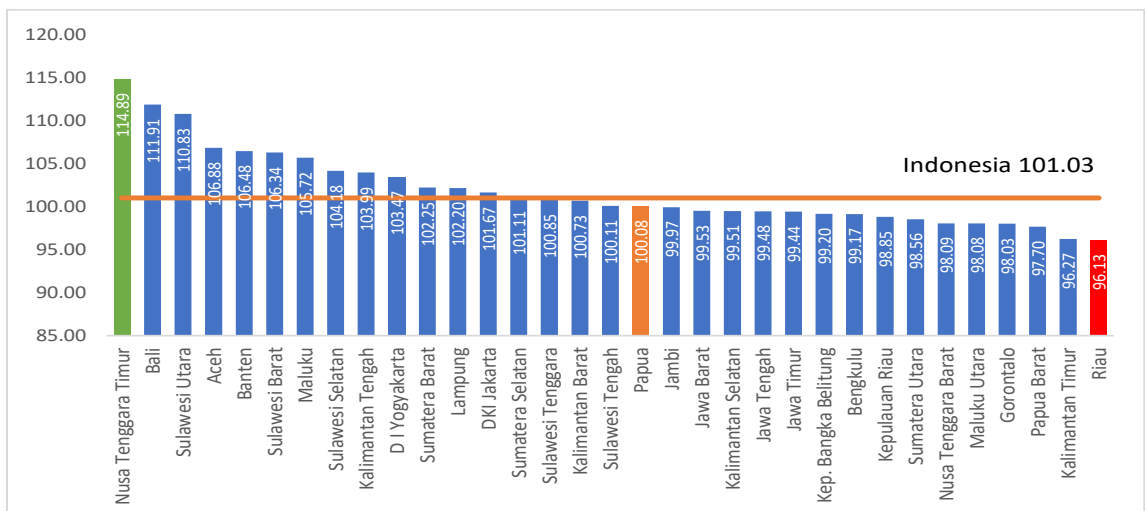
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Papua di triwulan III-2019 (Juli-September 2019) sebesar 100,08. Angka ITK yang berada di atas 100 mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan kondisinya di triwulan II-2019 (April-Juni 2019) dengan nilai ITK Triwulan II-2019 sebesar 118,68.

Indikasi membaiknya kondisi ekonomi konsumen Papua di triwulan ini disebabkan oleh meningkatnya seluruh variabel pembentuk komponen ITK. Variabel tersebut adalah pendapatan rumah tangga

sebesar 104,63, pengaruh inflasi terhadap total konsumsi rumah tangga sebesar 94,24 dan volume konsumsi barang/jasa sebesar 96,65. Peningkatan tersebut dipicu adanya pembayaran gaji ke-13 bagi PNS.

Di tingkat nasional, kondisi ekonomi konsumen di triwulan III-2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya dengan indeks sebesar 101,03. Naiknya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional karena membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada sebagian provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur tercatat memiliki ITK tertinggi yaitu sebesar 144,89. Sedangkan

Gambar 23. ITK Triwulan III Tahun 2019 Tingkat Nasional dan Provinsi



ITK terendah di Provinsi Riau dengan nilai indeks 96,13.

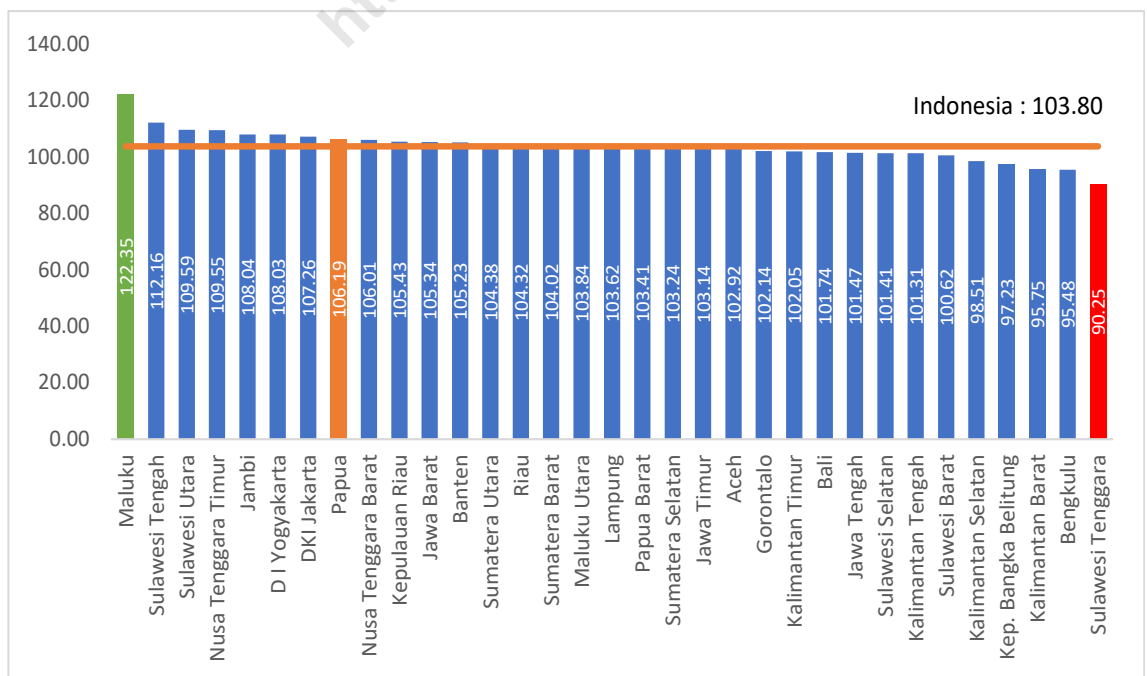
B.Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV Tahun 2019

Perkiraan ITK triwulan IV-2019 Provinsi Papua diperkirakan sebesar 106,19 yang berarti kondisi ekonomi konsumen meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi dibandingkan kondisinya di triwulan III-2019. Untuk triwulan IV-2019 (Oktober-Desember 2019), angka ITK nasional diperkirakan sebesar 103,80 yang berarti kondisi ekonomi konsumen diperkirakan juga akan meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi dibandingkan kondisinya di triwulan III-2019.

Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya peningkatan perkiraan Pendapatan Mendatang meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi dibandingkan pada triwulan III-2019 (nilai indeks 113,83), sedangkan rencana Pembelian Barang Tahan Lama, Rekreasi dan Pesta/Hajatan justru menurun dengan nilai indeks 92,62.

Selain itu, meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional disebabkan meningkatnya perkiraan kondisi ekonomi konsumen pada sebagian besar provinsi di Indonesia, meskipun ada beberapa provinsi yang perkiraan ITK triwulan III-2019 menurun. Perkiraan ITK tertinggi terjadi di Provinsi Maluku mencapai 122,35; sementara perkiraan ITK terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 90,25.

Gambar 24. Perkiraan ITK Triwulan IV Tahun 2019 Tingkat Nasional dan Provinsi



<https://papua.bps.go.id>



PERTANIAN

TANAMAN PANGAN



Tahukah anda??

“Produksi Padi tahun 2018 Provinsi Papua mencapai 130,718 ton gabah kering giling”

Penghitungan angka produksi Padi tahun 2018 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area(KSA). Dengan Metode tersebut dapat dihitung luas panen, dan potensi luas panen.

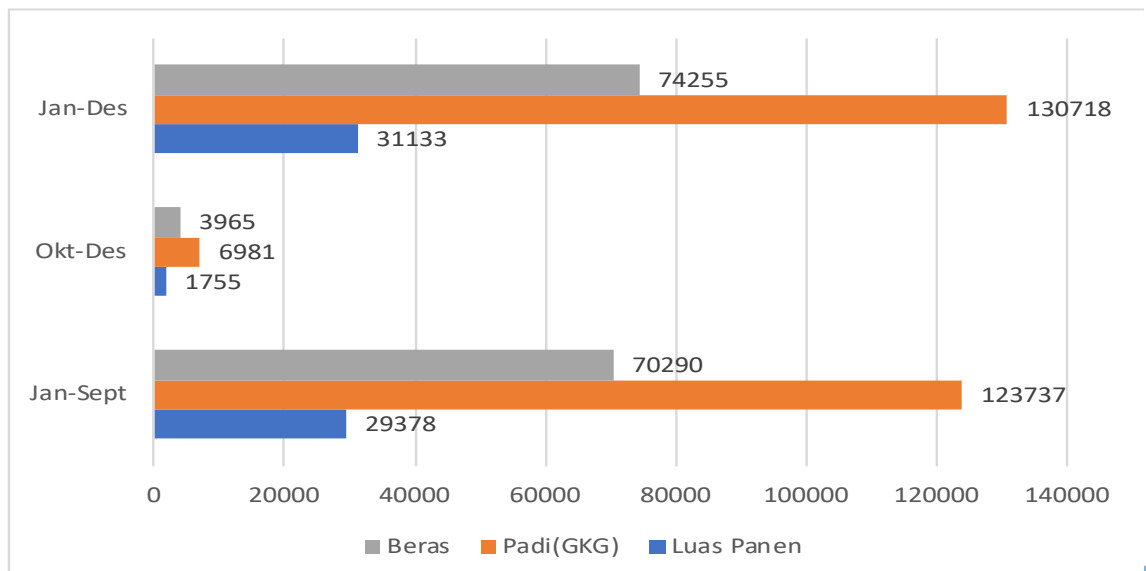
Berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di Provinsi Papua periode Januari-September 2018 sebesar 29.378 hektar. Sedangkan potensi luas panen bulan Oktober hingga Desember mencapai 1.755 hektar sehingga secara total luas panen di tahun 2018 mencapai 31.133 hektar.

Produksi Padi Provinsi Papua tahun 2018 mencapai 130.718 ton gabah kering giling (GKG), yang terdiri atas Produksi Padi sejak Januari hingga September 2018 sebesar 123.737 hektar.

Sementara potensi produksi padi 3 bulan terakhir (Oktober-Desember 2018) sebesar 6.981 ton.

Produksi Padi di Provinsi Papua dari Januari hingga September 2018 jika dikonversi menjadi beras dengan konversi GKG ke beras tahun 2018 setara 70.290 ton beras. Sementara itu, potensi produksi pada bulan Oktober hingga Desember 2018 diperkirakan sebesar 3.965 ton. Sehingga secara total produksi beras tahun 2018 adalah sebesar 74.255 ton.

Gambar 25. Produksi Tanaman Pangan Provinsi Papua Tahun 2018





<https://papua.bps.go.id>

**INFORMASI
LAINNYA**

INFORMASI LAINNYA

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Surabaya sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2017 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 229,82. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 469,96. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kabupaten Jayapura dengan nilai IKK sebesar 137,54.

B. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI Provinsi Papua tahun 2018 adalah 62,20 naik 0,86 poin dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua pada level 'sedang'.

IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 4,73 poin (dari 89,09 menjadi 84,36), peningkatan aspek Hak-hak Politik sebesar 5,74 poin (dari 42,16 menjadi 47,90) dan sedikit kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 0,14 poin (dari 56,91 menjadi 57,05).

C. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Secara umum, gini ratio di Papua selama kurun waktu 2010-2018 berfluktuasi. Tahun 2010, gini ratio Papua tercatat sebesar 0,414 dan meningkat menjadi 0,419 pada Maret 2011. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014, nilai Gini Ratio berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 yaitu sebesar 0,459.

Pada Maret 2015 Gini Ratio mulai turun menjadi 0,421 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,394 pada Maret 2019.



LAMPIRAN

PENJELASAN TEKNIS

- ❖ Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA. Penghitungan PDRB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
- ❖ PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran ekonomi.
- ❖ Penghitungan Indeks Harga Konsumen saat ini menggunakan tahun dasar 2012=100 sehingga sejak tahun 2014, data IHK mencakup 82 kota di seluruh Indonesia. Di Papua kota IHK diwakili oleh Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.
- ❖ Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
- ❖ Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan paling sedikit satu jam tidak terputus dalam seminggu lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif terlibat secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2015 - 2019

Jenis Indikator		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial						
Kepercayaan dan Kemiskinan	Jumlah penduduk (Jlwa)	3.149.375	3.207.444	3.265.444	3.322.526	3.379.302
	IPM	57,25	58,05	59,09	60,06	N/A
	1. AHH saat lahir (tahun)	65,09	65,12	65,14	65,36	N/A
	2. Harapan lama sekolah (tahun)	9,95	10,23	10,54	10,83	N/A
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,99	6,15	6,27	6,52	N/A
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.469	6.637	6.996	7.159	N/A
	Angkatan kerja (Jlwa)	1.709.668	1.743.160	1.753.858	1.851.486	1.808.848 ¹⁾
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	79,26	78,77	77,3	79,38	76,04 ²⁾
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,72	2,97	3,96	3,20	3,42 ³⁾
	Persentase penduduk miskin (persen)	28,17	28,54	27,62	27,43	27,53 ³⁾
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	402.031	427.176	457.541	499.643	540.099 ⁴⁾
	Distribusi pendapatan					
	40 % berpendapatan rendah	15,41	14,36	14,71	15,55	15,35 ³⁾
	40 % berpendapatan sedang	36,36	42,38	41,13	41,03	40,10 ³⁾
	20 % berpendapatan tinggi	48,24	43,26	44,16	43,42	44,55 ³⁾
Gini Ratio	0,39	0,397	0,398	0,398	0,394	
Indikator Ekonomi						
Pertumbuhan dan Ekonomi	Ekspor-Impor					
	Ekspor (Juta US\$)	2.007,34	2.004,04	2.454,59	3.856,46	-
	Januari-November 2019					1.048,76
	Impor (Juta US\$)	1.831,81	1.907,96	446,51	521,87	-
	Januari-November 2019					333,53
	Neraca Perdagangan (Juta US\$)	175,53	96,08	2.008,08	3.334,5	-
	Januari-November 2019					715,23
	Inflasi					
	Inflasi Kota Jayapura	2,79	4,13	2,41	6,70	0,85 ⁴⁾
	Inflasi Kabupaten Merauke	5,76	0,82	1,25	5,42	1,21 ⁴⁾
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
	Dengan Tambang (Persen)	7,97	9,21	4,64	7,33	-23,98 ⁶⁾
	Tanpa Tambang (Persen)	8,11	6,52	5,18	5,04	5,72 ⁴⁾
	PDRB Berliku					
	Dengan Tambang (miliar Rp)	150.307,28	173.208,86	188.945,17	210.659,81	50.345,76 ⁴⁾
Tanpa Tambang (Juta Rp)	101.880,49	114.183,51	122.464,78	133.313,76	36.544,96 ⁴⁾	
PDRB Harga Konstan						
Dengan Tambang (Juta Rp)	130.311,60	142.224,93	148.822,52	159.728,93	36.296,03 ⁴⁾	
Tanpa Tambang (Juta Rp)	77.400,24	82.384,56	86.648,46	91.016,63	24.163,55 ⁴⁾	

¹⁾ Keadaan Agustus 2019

²⁾ Keadaan Maret 2019

³⁾ Keadaan November 2019

⁴⁾ Keadaan November 2019 (Triwulan III-2019)

N/A : Not Available (data belum tersedia)

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2015-2019^{*)}

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	216.585	220.006	223.389	225.714	227.411
2	Jayawijaya	206.320	210.229	212.811	214.994	217.887
3	Jayapura	121.410	123.780	125.975	128.587	131.802
4	Nabire	140.178	142.795	145.101	147.921	150.308
5	Kepulauan Yapen	91.404	93.114	95.007	97.412	101.204
6	Biak Numfor	139.171	141.801	144.697	148.404	152.401
7	Paniai	164.280	167.325	170.193	173.392	177.410
8	Puncak Jaya	115.310	119.779	123.591	126.113	129.300
9	Mimika	201.677	205.591	210.413	215.493	219.689
10	Boven Digoel	63.020	64.674	66.209	67.717	69.211
11	Mappi	91.876	93.592	94.671	99.599	103.292
12	Asmat	88.578	90.316	92.909	95.606	97.490
13	Yahukimo	181.326	184.217	187.021	189.092	190.887
14	Pegunungan	71.710	72.511	73.473	74.396	75.788
15	Tolikara	131.323	133.786	136.576	137.695	139.111
16	Sarmi	36.797	37.511	38.210	39.406	40.515
17	Keerom	53.694	54.130	55.018	55.799	57.100
18	Waropen	28.395	28.803	29.480	30.612	31.514
19	Supiori	18.186	18.486	19.104	20.018	20.710
20	Mamberamo Raya	21.523	21.821	22.313	23.307	24.086
21	Niduga	94.173	95.885	97.012	97.517	98.595
22	Lanny Jaya	172.625	174.782	176.687	177.682	178.995
23	Mamberamo	46.321	46.696	47.487	48.090	48.201
24	Yalimo	58.891	59.778	60.822	61.115	62.605
25	Puncak	103.624	105.521	107.822	111.182	113.204
26	Dogiyai	92.190	93.809	94.997	96.590	97.902
27	Intan Jaya	45.917	47.300	48.318	48.812	49.292
28	Deiyai	69.381	70.620	72.206	72.486	73.199
29	Kota Jayapura	283.490	288.786	293.690	297.775	300.192
	Provinsi Papua	3.091.047	3.149.375	3.207.444	3.265.202	3.379.302

2019 *) angka hasil proyeksi penduduk

**Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	247,59	195,66	179,69	168,31	156,56
2	Jayawijaya	254,25	269,20	282,04	290,37	311,96
3	Jayapura	144,52	131,25	128,93	137,54	125,98
4	Nabire	164,59	148,86	152,00	147,53	150,45
5	Kepulauan Yapen	158,31	145,03	144,48	144,96	142,25
6	Biak Numfor	153,17	167,96	153,00	142,21	134,88
7	Paniai	214,95	227,34	215,29	225,31	250,29
8	Puncak Jaya	413,38	409,55	423,41	436,94	464,12
9	Mimika	193,34	173,41	156,16	148,00	150,54
10	Boven Digoel	180,93	196,67	181,24	171,29	161,96
11	Mappi	219,06	204,81	190,36	180,53	167,70
12	Asmat	226,59	207,30	220,75	231,32	213,94
13	Yahukimo	197,53	216,76	229,55	242,78	220,02
14	Pegunungan Bintang	386,29	367,19	379,97	391,44	368,02
15	Tolikara	385,95	366,04	351,04	351,23	377,27
16	Sarmi	242,60	219,74	200,31	188,91	163,77
17	Keerom	176,76	170,34	157,21	160,94	147,62
18	Waropen	152,10	166,40	154,47	163,01	186,5
19	Supiori	185,87	176,18	160,77	150,79	149,02
20	Mamberamo Raya	187,03	194,18	182,07	192,76	208,29
21	Nduga	321,30	342,18	326,15	318,34	325,36
22	Lanny Jaya	357,07	337,46	325,43	332,92	337,65
23	Mamberamo Tengah	399,62	379,92	392,84	403,74	429,33
24	Yalimo	388,65	369,21	352,28	343,90	370,50
25	Puncak	462,84	449,72	454,67	469,96	498,98
26	Dogiyai	235,19	220,72	204,28	209,49	236,53
27	Intan Jaya	431,26	424,02	397,57	412,52	441,38
28	Deiyai	222,61	221,29	218,81	229,29	253,83
29	Kota Jayapura	172,80	158,69	150,07	147,06	132,86
	Provinsi Papua	188,70	191,86	247,91	239,98	227,90

**Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Papua
Tahun 2013-2018**

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	66,88	67,33	67,75	68,09	68,64	69,38
2	Jayawijaya	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82
3	Jayapura	69,21	69,55	70,04	70,50	70,97	71,25
4	Nabire	65,45	66,25	66,49	66,64	67,11	67,70
5	Kepulauan Yapen	64,34	64,89	65,28	65,55	66,07	67,00
6	Biak Numfor	69,35	70,32	70,85	71,13	71,56	71,96
7	Paniai	53,70	53,93	54,20	54,34	54,91	55,83
8	Puncak Jaya	43,36	44,32	44,87	45,49	46,57	47,39
9	Mimika	69,50	70,40	70,89	71,64	72,42	73,15
10	Boven Digoel	57,96	58,21	59,02	59,35	60,14	60,83
11	Mappi	55,51	55,74	56,11	56,54	57,10	57,72
12	Asmat	45,54	45,91	46,62	47,31	48,49	49,37
13	Yahukimo	45,63	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51
14	Pegunungan Bintang	38,94	39,68	40,91	41,90	43,24	44,19
15	Tolikara	45,68	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85
16	Sarmi	59,51	60,48	60,99	61,27	62,31	63,00
17	Kerom	62,49	62,73	63,43	64,10	64,99	65,75
18	Waropen	61,68	61,97	62,35	63,10	64,08	64,80
19	Supiori	59,40	59,70	60,09	60,59	61,23	61,84
20	Mamberamo Raya	47,28	47,88	48,29	49,00	50,25	51,22
21	Nduga	24,42	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42
22	Lanny Jaya	43,05	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34
23	Mamberamo Tengah	42,43	43,19	43,55	44,15	45,50	46,41
24	Yalimo	43,33	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13
25	Puncak	37,73	38,05	39,41	39,96	41,06	41,81
26	Dogiyai	51,46	52,25	52,78	53,32	54,04	54,44
27	Intan Jaya	42,69	43,51	44,35	44,82	45,68	46,55
28	Deiyai	47,74	48,12	48,28	48,50	49,07	49,55
29	Kota Jayapura	77,46	77,86	78,05	78,56	79,23	79,61
	Provinsi Papua	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06

**PNDB Perkapita (Dengan Pertambahan dan Penggalan) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2015-2018 (Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	47.811.023,59	53.078.196,97	57.659.946,17	64.366.933,04
2	Jayawijaya	26.251.551,45	29.161.656,98	31.966.401,39	35.368.758,14
3	Jayapura	82.174.652,54	92.994.178,45	102.332.593,12	112.937.553,90
4	Nabire	54.980.416,67	60.346.153,97	65.521.130,70	70.179.656,67
5	KepulauanYapen	32.962.336,88	35.946.153,97	38.806.774,65	40.117.817,32
6	Biak Numfor	32.522.006,57	35.627.422,40	34.498.868,06	34.930.879,39
7	Paniai	17.759.824,71	19.599.838,08	20.705.782,81	22.532.059,76
8	Puncak Jaya	8.908.036,01	9.384.126,04	9.7655.576,66	10.316.039,35
9	Mimika	268.986.190,59	315.981.759,90	353.805.463,82	396.040.126,62
10	Boven Digoel	56.274.175,87	60.582.064,59	64.411.696,37	67.525.651,17
11	Mappi	21.076.162,88	23.205.239,84	25.654.125,49	26.872.878,93
12	Asmat	18.500.627,90	20.286.651,41	21.889.372,44	23.626.517,20
13	Yahukimo	9.373.344,49	10.015.819,06	10.892.973,93	11.808.450,71
14	Pegunungan Bintang	18.274.902,13	20.274.951,77	22.051.088,02	23.721.693,65
15	Tolikara	8.593.098,44	9.223.135,51	9.861.303,81	10.634.936,38
16	Sarmi	50.008.966,04	54.872.042,05	59.990.021,67	64.315.850,93
17	Keerom	39.483.966,54	43.158.726,32	46.182.136,00	48.422.111,60
18	Waropen	49.936.092,92	55.600.644,53	59.792.941,40	62.601.875,94
19	Supiori	42.162.729,85	44.922.394,76	46.754.638,83	47.298.604,45
20	Mamberamo Raya	48.078.905,95	54.489.881,63	59.778.066,95	63.708.877,65
21	Meluga	8.580.085,51	9.474.740,84	10.504.858,68	11.469.337,55
22	Lanny Jaya	7.154.441,68	7.912.642,87	8.661.891,10	9.453.175,66
23	Mamberamo Tengah	17.391.828,66	19.265.806,98	20.823.205,72	22.468.981,84
24	Yalimo	13.710.592,18	15.317.323,67	16.559.570,23	18.254.273,14
25	Puncak	8.704.367,30	9.756.558,61	10.667.499,68	11.569.147,43
26	Dogiyai	9.710.998,26	10.680.684,94	11.566.519,52	12.501.427,55
27	Intan Jaya	19.428.069,39	21.579.591,89	22.489.277,23	24.251.939,80
28	Deiyai	13.274.000,97	15.053.256,09	16.000.875,54	17.484.748,86
29	Kota Jayapura	81.574.706,76	90.135.176,33	95.739.151,131	102.139.373,87
	Provinsi Papua	47.726.067,65	54.002.146,16	57.866.303,29	63.403.511,08

*angka sementara

**angka sangat sementara

<https://papua.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp: (Telp. (0967) 5165 999, 5165 107
Homepage: <http://papua.bps.go.id>
E-mail: bps9400@bps.go.id



9 772477 447008